

**DETERMINASI PERILAKU KECURANGAN DAN KOMPETENSI
APARATUR DESA TERHADAP GOOD GOVERNMENT
GOVERNANCE DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL
MODERASI (STUDI PADA PEMERINTAHAN DESA DI
KECAMATAN KELILING DANAU, KABUPATEN KERINCI)**

Deli Rulia Wulandari¹⁾, Iskandar Sam²⁾, Wiwik Tiswiyanti³⁾

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi^{1,2,3)}
e-mail: delirulia78@gmail.com¹⁾, iskandar_sam@unja.ac.id²⁾, wiek-muis@unja.ac.id³⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perilaku kecurangan dan kompetensi aparatur desa terhadap terwujudnya Good Government Governance desa, serta menguji peran religiusitas sebagai variabel moderasi pada pemerintahan desa di Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner yang disebarakan kepada 234 aparatur desa dengan teknik sampling jenuh, dan diperoleh 183 kuesioner layak analisis. Data dianalisis menggunakan Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) berbantuan software SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku kecurangan berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Government Governancedesa. Religiusitas tidak terbukti memoderasi pengaruh perilaku kecurangan, namun terbukti memoderasi secara positif pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap Good Government Governance desa. Model penelitian mampu menjelaskan 59,5% variasi Good Government Governance desa, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Kata kunci: perilaku kecurangan, kompetensi aparatur desa, religiusitas, Good Government Governance

Abstract

This study aimed to analyze the effect of fraudulent behavior and village apparatus competence on the realization of Good Government Governance, and to examine the moderating role of religiosity in village governments in Keliling Danau Sub-district, Kerinci Regency. This study used a quantitative approach with a survey method, distributing questionnaires to 234 village officials using a saturated sampling technique, of which 183 questionnaires were returned and eligible for analysis. Data were analyzed using Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS software. The results showed that fraudulent behavior had a significant negative effect, while village apparatus competence had a significant positive effect on Good Government Governance. Religiosity did not moderate the effect of fraudulent behavior, but it positively moderated the effect of village apparatus competence on Good Government Governance. The research model explained 59.5% of the variance in Good Government Governance, while the remainder was explained by variables outside the model.

Keyword: fraudulent behavior, village apparatus competence, religiosity, Good Government Governance

1. PENDAHULUAN

Good Government Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, tidak terkecuali di tingkat desa. Tata kelola yang baik diharapkan mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat,

efektivitas pelaksanaan program, serta supremasi hukum (UNDP, [1997](#)). Dana desa di Indonesia merupakan kebijakan strategis yang diperkenalkan pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Khusus Kabupaten Kerinci, alokasi dana desa tahun 2024 tercatat sebesar Rp209.858.794.000, menjadikannya kabupaten dengan alokasi dana desa tertinggi di Provinsi Jambi (Antara News Jambi, [2024](#)). Besarnya alokasi ini semestinya sejalan dengan semakin kuatnya sistem tata kelola di tingkat desa agar dana yang dikelola benar-benar memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, keberadaan dana desa saat ini rentan terhadap potensi kecurangan (*fraud*). *Association of Certified Fraud Examiners* mendefinisikan *fraud* sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain ([ACFE, 2022](#)). Di Kabupaten Kerinci, tercatat beberapa kasus *fraud* dana desa, di antaranya korupsi yang melibatkan Kepala Desa Siulak Kecil Hilir dengan kerugian negara lebih dari Rp650 juta (JambiOne.Com, [2024](#)), serta kasus dua kepala desa di Kecamatan Batang Merangin dengan kerugian mencapai Rp644 juta akibat kegiatan fiktif (Kompas.com, [2025](#)). Fenomena ini menegaskan bahwa persoalan kecurangan pengelolaan dana desa di Kabupaten Kerinci bukan kejadian tunggal, melainkan pola berulang yang mengindikasikan lemahnya tata kelola di sejumlah desa.

Selain perilaku kecurangan, kompetensi aparatur desa turut menjadi faktor penentu terwujudnya *good governance*. Kompetensi aparatur yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kualitas keputusan yang diambil (Spencer & Spencer, [1993](#); Wibowo, 2019). Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu mengenai hubungan perilaku kecurangan, kompetensi aparatur, dan tata kelola/akuntabilitas pengelolaan dana desa masih menunjukkan *research gap* berupa celah empiris dan teoritis. Secara empiris, temuan mengenai kompetensi aparatur belum konsisten seperti penelitian oleh Wafa, Basri, dan Desmiyawati ([2020](#)) menemukan kompetensi aparatur berpengaruh positif signifikan terhadap *good governance*, sedangkan hasil penelitian Usman dan Suardi ([2023](#)) menemukan kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Pada sisi kecurangan, Rismayani et al. ([2024](#)) menemukan bahwa elemen-elemen *fraud hexagon* tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko *fraud* dana desa. Selanjutnya, Ari, Inapty, dan Waskito ([2023](#)) juga menemukan inkonsistensi dalam pengujian *fraud hexagon* terhadap kecenderungan *fraud*. Studi-studi tersebut menempatkan *fraud* sebagai variabel yang dijelaskan, sehingga belum diketahui bagaimana perilaku kecurangan memengaruhi terwujudnya *Good Governance* sebagai luaran pemerintahan desa. Secara teoritis, *fraud hexagon theory* dan teori kompetensi selama ini digunakan secara terpisah, dan belum menjelaskan dalam kondisi apa pengaruh keduanya terhadap tata kelola menguat atau melemah.

Ketidakkonsistenan tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan variabel lain yang memoderasi hubungan antar variabel tersebut. Religiusitas diduga berperan sebagai kontrol internal yang memperkuat atau memperlemah pengaruh perilaku kecurangan dan kompetensi aparatur desa terhadap *Good Government Governance* (Glock & Stark, [1965](#); Ancok & Suroso, [2018](#)). Namun, hasil penelitian mengenai peran moderasi religiusitas juga belum sepenuhnya konsisten. Fatmawati dan Putra ([2024](#)) menemukan religiusitas berperan memengaruhi kecenderungan *fraud* dana desa, dan Maulidi et al. ([2024](#)) menemukan religiusitas berpengaruh negatif signifikan terhadap korupsi. Sebaliknya, Rahman et al. ([2023](#)) yang meneliti pada konteks *fraud hexagon* di Kabupaten Kerinci menemukan bahwa religiusitas tidak selalu terbukti memoderasi seluruh elemen *fraud hexagon* terhadap

kecenderungan fraud, dan Harimurti (2025) juga menunjukkan hasil yang beragam antar variabel. Dengan demikian terdapat dua celah yang belum terjawab. Pertama, religiusitas pada penelitian sebelumnya diposisikan sebagai prediktor langsung atau sebagai moderator elemen fraud hexagon terhadap kecenderungan fraud, sehingga peran moderasinya terhadap hubungan perilaku kecurangan dan *Good Governance* belum diketahui. Kedua, peran moderasi religiusitas pada hubungan kompetensi aparatur desa dengan *Good Governance* masih belum diuji.

Penelitian ini mengisi celah tersebut dalam dua aspek. Secara teoritis, penelitian ini mengintegrasikan *fraud hexagon theory* dan teori kompetensi dalam satu model untuk menjelaskan *Good Government Governance*. Dengan religiusitas sebagai kontrol internal yang menjelaskan kapan pengaruh keduanya menguat atau melemah. Secara empiris, penelitian ini menguji religiusitas sebagai variabel moderasi melalui pendekatan interection effect dalam kerangka PLS-SEM pada dua jalur sekaligus (perilaku kecurangan dan kompetensi aparatur desa terhadap *Good Government Governance*) dengan *Good Government Governance* sebagai variabel dependen. Berbeda dengan Rahman et al. (2023) yang menggunakan kecenderungan fraud sebagai variabel dependen. Pengujian dilakukan pada 18 desa di kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Berdasarkan uraian fenomena dan *research gap* tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perilaku kecurangan dan kompetensi aparatur desa terhadap terwujudnya *Good Government Governance* desa, serta menguji peran religiusitas sebagai variabel moderasi pada pemerintahan desa di Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci.

2. KAJIAN TEORI

Fraud hexagon theory

Fraud hexagon theory merupakan pembaruan dari teori-teori kecurangan sebelumnya, yaitu *fraud triangle theory* (Cressey, 1953), *fraud diamond theory* (Wolfe & Hermanson, 2004), dan *fraud pentagon theory* (Crowe Howarth, 2011). Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Vousinas (2019) dengan menambahkan elemen *collusion*, sehingga teori ini terdiri atas enam elemen yang dikenal dengan model S.C.C.O.R.E., yaitu *stimulus* (tekanan), *capability* (kemampuan), *collusion* (kolusi), *opportunity* (kesempatan), *rationalization* (rasionalisasi), dan ego (arogansi). Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2022), *fraud* didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Dalam konteks penelitian ini, perilaku kecurangan aparatur desa direpresentasikan melalui keenam elemen tersebut, yang secara teoritis berkaitan erat dengan lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi, dan minimnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Teori Kompetensi

Konsep kompetensi mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Spencer & Spencer (1993) dalam *Competence at Work: Models for Superior Performance*, yang mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik dasar seseorang yang berkaitan secara kausal dengan kriteria acuan efektif dan/atau kinerja unggul dalam suatu pekerjaan. Kompetensi meliputi lima komponen, yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), konsep diri (*self-concept*), sifat (*trait*), dan motif (*motive*). Dalam penelitian ini, kompetensi aparatur desa diukur melalui empat indikator utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, dan pengalaman kerja. Teori ini diperkuat oleh Wibowo (2019) yang menyatakan bahwa kompetensi merupakan kemampuan melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan serta didukung sikap kerja yang sesuai tuntutan pekerjaan tersebut.

Good Government Governance

Konsep good governance mengacu pada United Nations Development Programme (UNDP, [1997](#)), yang menyatakan bahwa good governance mencakup “*the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country's affairs at all levels*”. Prinsip-prinsip good governance meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Dalam kerangka *agency theory*, tata kelola yang baik berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang mengurangi peluang (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*) yang menjadi pemicu tindakan kecurangan, sehingga semakin kuat penerapan *good governance* di desa, semakin kecil kemungkinan aparat desa melakukan penyimpangan.

Religiusitas

Religiusitas dijelaskan melalui teori Glock & Stark ([1965](#)) yang membagi religiusitas ke dalam lima dimensi, yaitu dimensi iman (ideologis), ibadah (ritualistic), ilmu (intelektual), ihsan (pengalaman), dan amal (konsekuensi). Ancok & Suroso ([2018](#)) menegaskan bahwa nilai-nilai agama yang dihayati seseorang dapat menjadi fondasi moral dan etika dalam bertugas. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menempatkan religiusitas sebagai variabel independen, penelitian ini memposisikan religiusitas sebagai variabel moderasi yang berfungsi sebagai kontrol internal (*internal control*) yang bekerja dari dalam diri individu, sehingga diduga mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara perilaku kecurangan dan kompetensi aparat desa terhadap terwujudnya *Good Government Governance*.

Pengembangan Hipotesis

Perilaku kecurangan aparat desa dapat didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan publik. Penelitian Satria, Chartady, dan Nurililah (2024) serta Lastrini dan Suartana (2023) menemukan bahwa elemen-elemen fraud hexagon secara simultan memengaruhi kecurangan laporan keuangan, yang secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap terwujudnya *Good Government Governance*. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis pertama:

H1: Perilaku kecurangan berpengaruh terhadap terwujudnya *Good Government Governance* desa.

Kompetensi aparat desa merupakan fondasi utama terwujudnya *Good Government Governance* karena tanpa kemampuan teknis, manajerial, dan etis yang memadai, prinsip-prinsip tata kelola yang baik sulit diimplementasikan secara konsisten. Wulandari dan Sari (2022) serta Rahman et al. ([2023](#)) menemukan bahwa kompetensi aparat berpengaruh signifikan terhadap efisiensi dan transparansi pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis kedua:

H2: Kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap terwujudnya *Good Government Governance* desa.

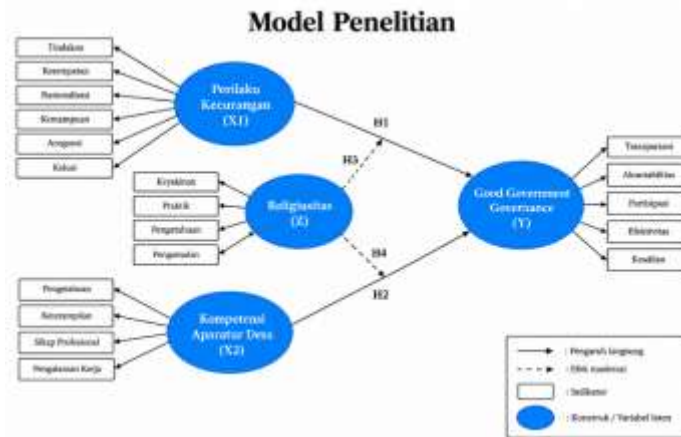
Religiusitas yang tinggi diduga memperlemah pengaruh negatif perilaku kecurangan terhadap *Good Government Governance*, karena nilai moral-agama menekan kecenderungan penyimpangan meskipun peluang dan rasionalisasi terbuka (Maulidi et al., [2024](#); Ali, [2026](#)). Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis ketiga:

H3: Religiusitas memoderasi pengaruh perilaku kecurangan terhadap terwujudnya *Good Government Governance* desa.

Sebaliknya, religiusitas diduga memperkuat pengaruh positif kompetensi terhadap *Good Government Governance*, sebab aparat yang kompeten sekaligus religius akan mengarahkan kemampuannya untuk kepentingan publik secara jujur dan bertanggung jawab

(Heriningsih & Sudaryati, 2019; Rahman at al., 2023). Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis keempat:

H4: Religiusitas memoderasi pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap terwujudnya *Good Government Governance* desa.



Gambar 1. Model Penelitian

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif asosiatif yang bertujuan menguji pengaruh perilaku kecurangan (X1) dan kompetensi aparatur desa (X2) terhadap terwujudnya *Good Government Governance* desa (Y), serta peran religiusitas (Z) sebagai variabel moderasi. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada perangkat desa di Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, yang terdiri dari 18 desa dengan populasi 234 orang, yaitu 13 orang pada setiap desa. Responden terdiri atas sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, dan kepala dusun. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh (*census sampling*), sehingga seluruh populasi dijadikan sampel.

Prosedur Pengumpulan Data dan Penanganan Non-Respons

Data dikumpulkan dari bulan Februari hingga Maret 2025 dengan mengantarkan kuesioner secara langsung kepada para responden. Kuesioner diambil kembali setelah tiga hari serta dilakukan sebanyak dua kali kunjungan. Sebelum mengisi, responden diberi penjelasan mengenai tujuan penelitian, kesukarelaan, dan kerahasiaan jawaban. Dari 234 kuesioner yang disebarakan, sebanyak 183 kuesioner (78,2%) kembali dan 51 kuesioner (21,8%) tidak kembali karena responden sedang tidak dapat ditemui. Seluruh kuesioner yang kembali telah diperiksa kelengkapan

berhasil dikembalikan dan seluruhnya dinyatakan layak, sehingga tidak ada kuesioner yang digugurkan. Tingkat pengembalian antar desa relatif seragam, yaitu 76,9% (10 dari 13 kuesioner) pada 15 desa dan 84,6% (11 dari 13 kuesioner) pada tiga desa. Sehingga tidak terdapat desa yang terwakili sangat rendah. Sebagai upaya meminimalisir non response, peneliti melakukan kunjungan ulang dan untuk desa yang berlokasi sangat jauh peneliti memberikan pengingat melalui telepon. Ukuran sampel 183 responden melampaui batas minimum yaitu 50 responden (10 kali jumlah jalur struktural terbanyak menuju variabel dependen yaitu 5 jalur) sehingga memadai untuk estimasi PLS-SEM, termasuk pengujian efek interaksi.

Setiap variabel diukur menggunakan skala Likert 1-5 (sangat tidak setuju sampai sangat setuju). Perilaku kecurangan (X1) diukur melalui enam indikator fraud hexagon:

tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, arogansi, dan kolusi (Wolfe & Hermanson, 2004; [ACFE, 2020](#)). Kompetensi aparatur desa (X2) diukur melalui empat indikator: pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, dan pengalaman kerja (Spencer & Spencer, 1993). Religiusitas (Z) diukur melalui lima dimensi: iman, ibadah, ilmu, ihsan, dan amal (Glock & Stark, 1965). *Good Government Governance* (Y) diukur melalui lima indikator: transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, *independensi*, dan kewajaran (*fairness*).

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Jumlah item	Sumber
Perilaku kecurangan	Tindakan penyimpangan atau penyelewengan yang dilakukan aparatur desa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan	Tekanan, Kesempatan, Rasionalisasi, Kemampuan, Arogansi, Kolusi	24	Wolfe & Hermanson (2004); ACFE (2020)
Kompetensi Aparatur Desa (X2)	Kemampuan aparatur desa dalam melaksanakan tugas secara efektif berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional	Pengetahuan, Keterampilan, Sikap profesional, Pengalaman kerja	12	(Spencer & Spencer, 1993; Wibowo, 2019)
Raligiustas (Z)	Tingkat keyakinan dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan dan pekerjaan, yang diduga memoderasi pengaruh X1 dan X2 terhadap Y	Dimensi Iman, Dimensi Ibadah, Dimensi Ilmu, Dimensi Ihsan, Dimensi Amal	15	(Glock & Stark, 1965; Ancok & Suroso, 2018)
Good Government Governance (Y)	"The way state power is used in managing economic and social resources for development of society"	Transparansi, Akuntabilitas, <i>Responsibility</i> , <i>Independensi</i> , Kewajaran (<i>Fairness</i>)	15	World Bank dalam Mardiasmo (2018)
Jumlah butir			66	

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan *software* SmartPLS, karena metode ini mampu menguji hubungan antar variabel laten secara simultan pada model pengukuran (*outer model*) maupun model struktural (*inner model*) (Ghozali & Latan, 2015; Hair et al., 2019). Efek moderasi religiusitas diuji menggunakan pendekatan *interaction effect (two-stage approach)* sebagaimana disarankan oleh Henseler dan Chin (2010) serta Hair et al. (2019). Evaluasi *outer model* meliputi uji validitas konvergen (*outer loading* > 0,70 dan *AVE* > 0,50), uji validitas diskriminan (*HTMT* < 0,90), dan uji reliabilitas (*Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* > 0,70). Evaluasi *inner model* meliputi uji *R-square*, uji *multikolinearitas*

(VIF), uji *effect size* (f^2), dan uji *goodness of fit* ($SRMR < 0,08$). Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai path coefficient, t-statistik, dan p-value hasil prosedur *bootstrapping* 5.000 subsampel, dengan kriteria signifikan apabila t-statistik $> 1,96$ atau p-value $< 0,05$.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian diperoleh dari 183 perangkat desa di Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, dengan tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) sebesar 78,2%. Karakteristik responden ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Responden Penelitian

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	89	48,6%
	Perempuan	94	51,4%
Usia	≤ 30 tahun	25	13,7%
	31-40 tahun	59	32,2%
	41-50 tahun	50	27,3%
	≥ 50 tahun	49	26,8%
Pendidikan	SLTA	69	37,7%
	S1/D3	112	61,2%
	S2	2	1,1%
Lama Bekerja	< 2 tahun	53	29,0%
	≥ 2 tahun	130	71,0%
Jabatan	Sekretaris desa	18	9,8%
	Kepala urusan	68	37,2%
	Kepala seksi	52	28,4%
	Kepala dusun	45	24,6%

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 2, responden penelitian didominasi oleh perempuan (51,4%), berada pada rentang usia produktif 30-50 tahun (59,6%), berpendidikan S1/D3 (61,2%), dan telah bekerja selama 2 tahun atau lebih (71,0%), yang mengindikasikan bahwa aparatur desa di lokus penelitian memiliki pengalaman kerja yang relatif memadai dalam menjalankan tugas pemerintahan desa. Berdasarkan jabatan, terdapat 9,8% sekretaris desa, 37,2% kepala urusan, 28,4% kepala seksi dan 24,6% kepala dusun.

Evaluasi Outer Model

Validitas konvergen dinilai berdasarkan nilai Outer Loading setiap indikator dan nilai Average Variance Extracted (AVE) setiap konstruk. Suatu indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai Outer Loading $> 0,70$, sedangkan konstruk dinyatakan valid apabila nilai AVE $> 0,50$ (Hair et al., 2019). Tabel 3 menunjukkan bahwa seluruh indikator pada keempat konstruk memiliki nilai Outer Loading di atas 0,70, bahkan mayoritas di atas 0,80,

dan seluruh konstruk memiliki nilai AVE di atas 0,50, sehingga validitas konvergen model terpenuhi.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Konvergen

Variabel	AVE	Kriteria	Keterangan
Perilaku Kecurangan (X1)	0,717	> 0,50	Valid
Kompetensi Aparatur Desa (X2)	0,785	> 0,50	Valid
<i>Good Government Governance</i> (Y)	0,743	> 0,50	Valid
Religiusitas (Z)	0,777	> 0,50	Valid

Sumber: Output SmartPLS, 2026

Uji Reliabilitas

Analisis reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability. Instrumen penelitian dinyatakan memiliki reliabilitas yang baik apabila nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability di atas 0.7 ([Hair et al., 2019](#)).

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Konstruk	Composite Reliability (pc)	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Perilaku Kecurangan (X1)	0,984	0,983	> 0,70	Reliabel
Kompetensi Aparatur Desa (X2)	0,978	0,975	> 0,70	Reliabel
<i>Good Government Governance</i> (Y)	0,977	0,975	> 0,70	Reliabel
Religiusitas (Z)	0,981	0,980	> 0,70	Reliabel

Sumber: Output SmartPLS, 2026

Berdasarkan tabel 4, seluruh konstruk memiliki nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha di atas 0,70, bahkan mendekati angka 1. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian ini dinyatakan reliabel dan konsisten secara internal.

Evaluasi Inner Model

Nilai R-square sebesar 0,595 (Tabel 5) menunjukkan bahwa perilaku kecurangan, kompetensi aparatur desa, religiusitas, serta interaksi moderasinya secara bersama-sama mampu menjelaskan 59,5% variasi *Good Government Governance* desa, yang termasuk kategori moderat ([Hair et al., 2019](#)). Hasil uji multikolinearitas menunjukkan seluruh nilai Inner VIF berada di bawah 5, sehingga model bebas dari masalah multikolinearitas. Hasil uji effect size (f^2) menunjukkan bahwa perilaku kecurangan ($f^2 = 0,395$) dan kompetensi aparatur desa ($f^2 = 0,541$) memiliki kontribusi besar, sedangkan religiusitas ($f^2 = 0,142$) berkontribusi menengah terhadap *Good Government Governance*. Efek interaksi $Z \times X1$ hampir tidak berkontribusi ($f^2 = 0,004$), sedangkan efek interaksi $Z \times X2$ memberikan kontribusi kecil namun tetap terdeteksi ($f^2 = 0,022$). Nilai SRMR model sebesar 0,039, berada di bawah ambang batas 0,08, sehingga model dinyatakan fit dengan data empiris.

Tabel 5. Nilai R-square

Variabel Dependen	R-square	R-square Adjusted	Kategori
<i>Good Government Governance</i> (Y)	0,595	0,583	Moderat

Sumber: Output SmartPLS, 2026

Nilai R-square sebesar 0,595 menunjukkan bahwa variabel perilaku kecurangan (X1), kompetensi aparatur desa (X2), religiusitas (Z), serta interaksi moderasinya (X1Z dan X2Z) secara bersama-sama mampu menjelaskan 59,5% variasi *Good Government Governance* desa.

Pengujian Hipotesis dan Efek Moderasi

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai path coefficient (koefisien jalur), t-statistik, dan p-value hasil prosedur bootstrapping 5.000 subsampel pada SmartPLS. Hipotesis diterima apabila t-statistik > 1,96 ($\alpha = 5\%$) atau p-value < 0,05.

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hubungan	Koefisien (β)	t-statistik	p-value	Kriteria	Keterangan
H1	X1 $\rightarrow$ Y	-0,410	7,685	<0,001	t > 1,96 / p < 0,05	Diterima
H2	X2 $\rightarrow$ Y	0,503	10,365	<0,001	t > 1,96 / p < 0,05	Diterima
H3	Z*X1 $\rightarrow$ Y	-0,040	0,807	0,420	t > 1,96 / p < 0,05	Ditolak
H4	Z*X2 $\rightarrow$ Y	0,097	2,096	0,036	t > 1,96 / p < 0,05	Diterima

Sumber: Output SmartPLS, 2026

Hasil pengujian H1 menunjukkan bahwa perilaku kecurangan (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Good Government Governance* desa ($\beta = -0,410$; t = 7,685; p < 0,001), sehingga H1 diterima. Temuan ini mengonfirmasi bahwa semakin tinggi intensitas perilaku kecurangan aparatur desa baik dalam bentuk tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas, arogansi, maupun kolusi sebagaimana dijelaskan dalam fraud hexagon theory (Vousinas, 2019) semakin rendah kualitas tata kelola pemerintahan desa. Temuan ini relevan dengan fenomena kasus korupsi dana desa di Kabupaten Kerinci yang diuraikan sebelumnya, dan konsisten dengan agency theory, di mana asimetri informasi dan lemahnya pengawasan mendorong agen (aparatur desa) bertindak oportunistik yang mendegradasi kualitas tata kelola.

Hasil pengujian H2 menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Good Government Governance* desa ($\beta = 0,503$; t = 10,365; p < 0,001), sehingga H2 diterima. Koefisien ini merupakan yang terbesar dalam model, menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa merupakan prediktor paling dominan terhadap terwujudnya *Good Government Governance*. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Wafa, Basri, dan Desmiyawati (2020) serta Situngkir dan Simarmata (2022), namun berlawanan dengan Usman dan Suardi (2023). Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh karakteristik responden penelitian ini yang mayoritas berpendidikan S1/D3 (61,2%) dan telah bekerja lebih dari 2 tahun (71,0%), sehingga tingkat kompetensi aparatur relatif lebih matang.

Hasil pengujian H3 menunjukkan bahwa interaksi religiusitas dengan perilaku kecurangan (Z×X1) tidak signifikan ($\beta = -0,040$; t = 0,807; p = 0,420), sehingga H3 ditolak. Religiusitas tidak terbukti memoderasi pengaruh perilaku kecurangan terhadap *Good Government Governance* desa. Hasil ini mengindikasikan bahwa perilaku kecurangan dalam pengelolaan dana desa lebih banyak didorong oleh faktor struktural dan sistemik seperti lemahnya pengendalian internal dan longgarnya pengawasan eksternal ketimbang oleh nilai moral-spiritual individu semata. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahman at al. (2023) yang berlokus di Kabupaten Kerinci. Hasil ini juga konsisten dengan temuan Tiswiyanti dan Herawaty (2024) pada konteks kecurangan akademik, yang menyimpulkan bahwa religiusitas sebagai variabel moderasi tidak mampu memengaruhi secara signifikan hubungan antara dimensi fraud dan perilaku kecurangan, dengan *effect size* yang tergolong lemah, sehingga religiusitas dalam penelitian tersebut berperan sebagai homologizer

moderator. Karena pengaruh langsung Z terhadap Y signifikan namun interaksi $Z \times X_1$ tidak signifikan, religiusitas pada jalur ini berperan sebagai predictor moderator.

Hasil pengujian H4 menunjukkan bahwa interaksi religiusitas dengan kompetensi aparatur desa ($Z \times X_2$) signifikan secara positif ($\beta = 0,097$; $t = 2,096$; $p = 0,036$), sehingga H4 diterima. Religiusitas terbukti memoderasi secara positif pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap *Good Government Governance* desa, artinya pengaruh kompetensi akan semakin kuat pada aparatur yang memiliki religiusitas tinggi. Nilai-nilai religiusitas berperan sebagai kompas moral yang mengarahkan kapasitas teknis dan manajerial aparatur agar digunakan secara jujur dan bertanggung jawab. Temuan ini sejalan dengan Heriningsih dan Sudaryati (2019) serta Rahman et al. (2023). Berdasarkan klasifikasi Sharma et al. (1981), karena pengaruh langsung Z terhadap Y signifikan dan interaksi $Z \times X_2$ juga signifikan, religiusitas pada jalur ini berperan sebagai quasi moderator.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik di Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, sangat ditentukan oleh rendahnya perilaku kecurangan dan tingginya kompetensi aparatur desa, sementara religiusitas berperan lebih efektif sebagai penguat dampak kompetensi dibandingkan sebagai peredam dampak kecurangan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perilaku kecurangan dan kompetensi aparatur desa terhadap terwujudnya *Good Government Governance* desa, serta menguji peran religiusitas sebagai variabel moderasi pada desa-desa di Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) terhadap 183 responden yang merupakan perangkat desa, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perilaku kecurangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terwujudnya *Good Government Governance* desa (koefisien jalur = $-0,410$; t -statistik = $7,685 > 1,96$; p -value = $0,000 < 0,05$), sehingga H1 diterima. Temuan ini membuktikan bahwa semakin tinggi intensitas perilaku kecurangan aparatur desa baik dalam bentuk tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kapabilitas, arogansi, maupun kolusi sebagaimana dijelaskan dalam *Fraud hexagon theory* maka semakin rendah kualitas tata kelola pemerintahan desa yang terwujud.
2. Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap terwujudnya *Good Government Governance* desa (koefisien jalur = $0,503$; t -statistik = $10,365 > 1,96$; p -value = $0,000 < 0,05$), sehingga H2 diterima. Nilai koefisien ini merupakan yang terbesar dalam model penelitian, yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa merupakan prediktor paling dominan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dibandingkan variabel lainnya. Semakin tinggi pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, dan pengalaman kerja aparatur desa, semakin baik pula kualitas tata kelola yang dihasilkan.
3. Religiusitas tidak terbukti memoderasi pengaruh perilaku kecurangan terhadap terwujudnya *Good Government Governance* desa (koefisien interaksi = $-0,040$; t -statistik = $0,807 < 1,96$; p -value = $0,420 > 0,05$), sehingga H3 ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa kuat lemahnya nilai religiusitas yang dimiliki aparatur desa tidak mampu memperlemah dampak negatif perilaku kecurangan secara statistik signifikan, karena perilaku kecurangan pada pengelolaan dana desa lebih banyak dipengaruhi oleh faktor struktural dan sistem pengendalian internal daripada oleh nilai moral-spiritual individu

semata. Berdasarkan klasifikasi Sharma et al. (1981), religiusitas pada jalur ini berperan sebagai *predictor moderator*.

4. Religiusitas terbukti memoderasi secara positif pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap terwujudnya *Good Government Governance* desa (koefisien interaksi = 0,097; t-statistik = 2,096 > 1,96; *p-value* = 0,036 < 0,05), sehingga H4 diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi aparatur terhadap tata kelola pemerintahan desa akan semakin kuat pada aparatur yang memiliki tingkat religiusitas tinggi, karena nilai-nilai keagamaan mengarahkan penggunaan kompetensi secara jujur dan bertanggung jawab demi kepentingan publik. Berdasarkan klasifikasi Sharma et al. (1981), religiusitas pada jalur ini berperan sebagai *quasi moderator*.

Secara keseluruhan, model penelitian ini mampu menjelaskan 59,5% variasi *Good Government Governance* desa ($R^2 = 0,595$, kategori moderat), sedangkan 40,5% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Saran

Pemerintah desa disarankan memprioritaskan penguatan sistem pengendalian internal, seperti optimalisasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), penguatan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta peningkatan transparansi pelaporan keuangan desa, mengingat perilaku kecurangan terbukti paling menurunkan kualitas tata kelola. Pemerintah desa juga perlu secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi aparatur melalui pelatihan teknis pengelolaan keuangan desa, serta membina nilai-nilai religiusitas sebagai penguat dampak positif kompetensi. Pemerintah Kabupaten Kerinci, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Inspektorat Daerah, disarankan memperkuat fungsi pengawasan eksternal melalui audit rutin dan pendampingan teknis, karena religiusitas individu saja tidak cukup untuk menekan perilaku kecurangan tanpa didukung sistem pengendalian yang kuat. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas lokus penelitian ke beberapa kecamatan atau kabupaten lain, mempertimbangkan penambahan variabel seperti sistem pengendalian internal atau *whistleblowing system*, serta menggunakan desain penelitian longitudinal untuk memperkaya validitas temuan mengenai perilaku kecurangan yang bersifat sensitif.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2022). Occupational fraud 2022: A report to the nations. Association of Certified Fraud Examiners.
- Ali, J. (2026). Does religiosity influence corruption and sustainable development across countries? *International Journal of Social Economics*, 53(2), 197–214.
- Ancok, D., & Suroso, F. N. (2018). Psikologi Islami: Solusi Islam atas problem-problem psikologi. Pustaka Pelajar.
- Antara News Jambi. (2024). DJPb: Penyaluran dana desa di Jambi tembus Rp. 775,56 miliar sampai Juni. Antara News Jambi.
- Ari, U. A. D., Inapty, B. A., & Waskito, I. (2023). Determinan fraud dana desa: Pengujian elemen fraud hexagon. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 22(2), 295–309.
- Fatmawati, F., & Putra, W. M. (2024). Pengaruh good governance dan religiusitas terhadap kecenderungan fraud dana desa. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(2), 1734–1747. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i2.1629>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial least squares: Konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program SmartPLS 3.0. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Glock, C. Y., & Stark, R. (1965). Religion and society in tension. Rand McNally.

- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24.
- Harimurti, B., Safelia, N., & Erwati, M. (2025). Determinan pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa dimoderasi religiusitas. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(2).
- Henseler, J., & Chin, W. W. (2010). A comparison of approaches for the analysis of interaction effects between latent variables using partial least squares path modeling. *Structural Equation Modeling*, 17(1), 82–109.
- Heriningsih, S., & Sudaryati, D. (2019). Pengaruh good governance dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan dana desa dengan religiusitas sebagai pemoderasi. *Jurnal Optimum*, 9(1), 61–72.
- JambiOne.Com. (2024). Jadi tersangka korupsi dana desa, Kades Siulak Kecil Hilir ditahan, ini penjelasan Kejari Sungai Penuh. JambiOne.Com.
- Kompas.com. (2025). Kades hingga mantan Kades di Kerinci Jambi korupsi Rp 644 juta dana desa. Kompas.com.
- Maulidi, A., Girindratama, M. W., Soeherman, B., & Andono, F. A. (2024). Organizational culture, power distance and corruption: The mediating role of religiosity. *The Indonesian Accounting Review*, 14(2), 203–221.
- Rahman, N. A., Ahmad, A. H., Ani, N. S., Kadir, A. R., Reni, A., & Gjorevska, E. (2023). Application of hexagon's fraud theory in detecting the tendency of fraud in village fund management in Kerinci Regency with religiosity as a moderation variable. *International Journal of Business and Quality Research*, 1(3), 75–87.
- Rismayani, G., Sukmana, W., Somantri, Y. F., Sundari, Y. R., Suhaya, V. F., & Suganda, F. F. (2024). Identifikasi fraud hexagon theory dan partisipasi masyarakat desa dalam memitigasi risiko fraud pengelolaan dana desa. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 8(2), 553–570.
- Situngkir, A., & Simarmata, B. I. (2022). Pengaruh kompetensi aparatur desa, transparansi, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan*, 5(2), 96–104.
- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at work: Models for superior performance*. John Wiley & Sons.
- Tiswiyanti, W., & Herawaty, N. (2024). Religiusitas sebagai Homologizer Moderasi dalam Hubungan antara Dimensi Fraud Diamond dan Kecurangan Akademik pada Perkuliahan Daring. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 709–717.
- UNDP. (1997). *Governance for sustainable human development*. United Nations Development Programme.
- Usman, H., & Suardi, A. (2023). Pengaruh sistem pengendalian intern dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas dana desa. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 1(3), 161–178.
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: The S.C.O.R.E. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381.
- Wafa, R., Basri, Y. M., & Desmiyawati, D. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah, partisipasi masyarakat dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap penerapan good governance. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 4(1), 60–71.
- Wibowo. (2019). *Manajemen kinerja*. Rajawali Pers.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.